

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran perangkat Desa Taba Baru dalam penertiban administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran, telah dilaksanakan melalui kegiatan pendataan penduduk, pemberian pelayanan administrasi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran, keterbatasan sumber daya aparatur desa, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurang maksimalnya koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait. Kondisi tersebut mengakibatkan masih terdapat penduduk yang belum memiliki akta kelahiran meskipun ketentuan hukum telah mengaturnya secara jelas.
2. Pandangan Fiqih Siyasah Tanfiziyah terhadap peran perangkat desa dalam penertiban administrasi kependudukan menunjukkan bahwa secara prinsip telah mencerminkan nilai amanah dan kemaslahatan, yakni melalui upaya pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar anak atas identitas hukum. Namun, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip siyasah tanfiziyah. Hal ini terlihat dari belum meratanya keadilan pelayanan, lemahnya penerapan musyawarah, kurang optimalnya perlindungan hak masyarakat, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Kepada Pemerintah Desa
Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam penertiban administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran, melalui pelayanan yang lebih aktif,

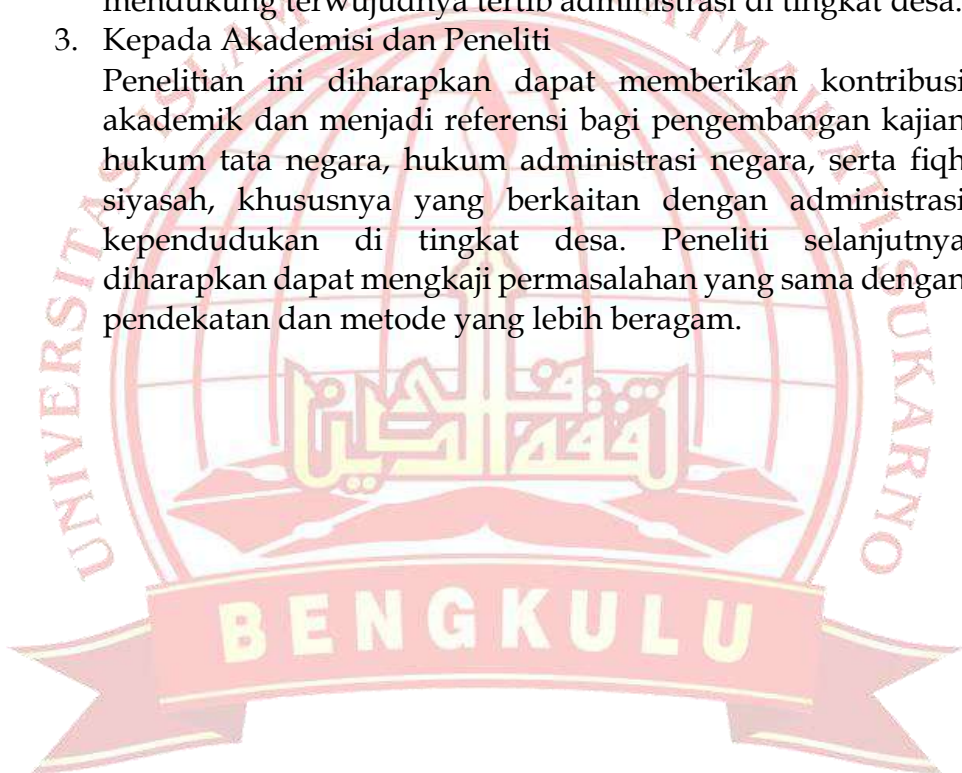
transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, perangkat desa perlu melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan sebagai hak dasar warga negara.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi untuk tertib administrasi kependudukan, khususnya dalam pengurusan akta kelahiran. Kesadaran ini penting agar hak-hak sipil masyarakat dapat terpenuhi serta mendukung terwujudnya tertib administrasi di tingkat desa.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta fiqh siyasah, khususnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan di tingkat desa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji permasalahan yang sama dengan pendekatan dan metode yang lebih beragam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama RI, Departemen. *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2007.

Buku

Achmadi, Abu, and Cholid Narbuko. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Affan, Gaffar. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

C, Edward III George. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al, 1990.

Deddy, Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada, 2018.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Herni, Sri Nurbayanti, Rofiandri Ronal, and Novitarini Wini. *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2003.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

- Jakarta: Kencana, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta; Bumi Aksara, 2008.
- Mazmanian, Daniel A, and Paul A Sabatier. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mujar, Ibnu Syarif, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Pitlo, A. *Pembuktian Dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif,. Jakarta: PT. Intermasa, 1978.
- Purwanto, Sulistyastuti, and Dyah Ratih Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001.
- Ripley, Randall B. *Policy Implementation and Bureaucracy*. second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.
- Singarimbun, Masri, Efendi Sofyan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Indeks, 1998.
- Siswosoediro, Henry S. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: VisiMedia, 2008.
- Soemartono, Triyuni, and Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011.
- Sudikno, Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R*

- Dan D. Bandung: Rieneka Cipta, 2011.
- Sunarto, Ahmad. *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Taher, Arifin. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Toha Andiko. *Pemberdayaan Qawâld Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Usman, Husaini. *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Widjaja, H A W. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

- Akib, Haedar, and Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makasar*, 2008.
- Darmawan, Agus, Januar Fitriana, Andika Avicena Setiawan, and Adhila Salsabila Safira. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan." *Jurnal Bina Desa* 4, no. 3 (2023): 296–303.
- Pratama, M Rizki. "Trajektori Studi Administrasi Publik." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 2, no. 2 (2020): 169–79.
- Suharto, Didik G. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik." *Jurnal Bina Praja* 4, no. 3 (2012): 153–60.

Kamus

- Albani, Muhammad Arief. *Kamus Nahdatul Ulama*. Jakarta: NU, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Subekti, R, and R Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Skripsi

Haryono. "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013.

Siregar, Faizal Anwar. "Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan." Universitas Medan Area: Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa